



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Bagir Manan, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- , *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005
- , *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- , *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2001
- , *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001
- , *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 87.
- , *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta, Kompas, 2008
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Konstitusi dalam Tatanan Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Firdaus Arifin, "Reconstruction of the Legislative Authority of the Regional Representative Council in the Context of Optimizing the Position of the Regional Representative Council as a Representative Institution
- Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008
- I Gede Pantja Astawa, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Refika Aditama, 2012



Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

-----, *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

-----, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005

-----, *Gagasan Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2010

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

-----, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

-----, *Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007

-----, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2007

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Kamus Hukum, Definisi kedudukan, Balai Pustaka, Jakarta, 2010

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Maruarar Siahaan, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

-----, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta. Rajawali Pers, 2010

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017

Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Terj. O. Nusantara, Jakarta: Nusa Media, 2018, hlm

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press, 2016

-----, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019

-----, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018

-----, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2010

-----, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007

Saldi Isra, *Lembaga Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018

-----, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok, Rajawali Pers, 2018

-----, *Pergulatan Demokrasi dan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019

-----, *Pergulatan Hukum dan Politik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

-----, *Pergulatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

-----, *Pergulatan Kekuasaan dalam Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- , *Pergulatan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2010
- , *Pergulatan Politik Ketatanegaraan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Sri Soemantri, *Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Abin Rifa Aldani, "Wacana Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif," *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, Vol. 1, No. 2, (2024), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/31001?>
- Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD): From Symbolic Function to Substantial Role," *Tadulako Law Review* (2025): 23–38, <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>
- Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD)," *Tadulako Law Review*, Vol. 10, No.1, 2025 <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>
- Achmad Labib Chidqi, "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral yang Ideal," *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2 (2020), <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3773>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1423>

Anggi Sihol Dameanti dkk., "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, (2024), <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.390>

Anggi Sihol Dameanti, Reza Mahendra, dan Yori Viski Oktivan, "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2024, <https://journal.ascarya.or.id/index.php/civil/article/view/390?>

Asroful Maghfur dkk. Disparities and Strengthening of the Authority of the DPD," *European Journal of Education and Social Sciences* Vol. 6, No.1, 2025, <https://ejeset.saintispub.com/ejeset/article/download/489/245>

B. H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No.9, (2024), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>

Benediktus H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>

Catur Wido Haruni, "Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulation Drafts and Regional Regulations by Regional Representative Council," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20532>

Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2011

Deizan Azriel Drahmasyfa dkk., "Rekonstruksi Kewenangan DPD dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2025), <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850?>

Wolastian Jati Risdianto, Adriana Grahani F, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Amerika Serikat sebagai Regional Representative Body*. *Jurnal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* (Vol. 7, No. 1). DOI: <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.49993>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Fandy Gultom dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2037>

Fathul Muin, "DPD RI dalam Dimensi Kelembagaan dan Kewenangan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3680>

Fitriani Ahlan dan Ricca Anggraeni, "Menyikapi Keterbatasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah: Optimalisasi Pelaksanaan Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan* (2025), <https://asipper.or.id/index.php/asipper/article/view/8>

Jumadi, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral Parlemen," *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2017): 1–18, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7983>

Marzuki Marzuki, *Towards Balanced Bicameralism: Reconstruction of Law-making powers in Indonesian Representative Institutions, Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 5 No. 2, (2023), <https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>

Muhamad Ali Safa'at, "Kedudukan DPD dalam Sistem Bikameral Indonesia," *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4, No. 2 (2021), <https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>

Muhammad Hafiz and Reza Ajeng Febiani, "The Effectiveness of Regional Representative Councils: An Analysis of Checks and Balances and the Protection of Indigenous Peoples Rights," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2025), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7278>

R. S. R. Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2021), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

Raden Siti Rachmah Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGn Jurnal*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum Vol. 5, No. 1 (2023),
<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

Rizal Fahmi Mustari, Ahmad Sholikhin Ruslie, “Efektivitas Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2026
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/4009>

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011

Safrin Salim et al., “Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D UUD 1945),” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 11, No.1 2025,
<https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7078>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemend

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.